

**DAMPAK PEMBERIAN BEBAS VISA BERDASARKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA
KUNJUNGAN**

Rakha Aditya Afrizal

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Peraturan tersebut dibuat juga karena dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian dengan menggunakan data-data kepustakaan yang berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini membahas implikasi pemberlakuan kebijakan bebas visa dalam perspektif ketenagakerjaan dan bagaimana cara pemerintah mengatasi dampak dari pemberlakuan kebijakan bebas visa. Dari Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemberlakuan bebas visa memiliki dampak yang cukup besar dalam bidang ketenagakerjaan khususnya dalam kasus tenaga kerja asing ilegal yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa, masih lemahnya pengawasan dari pemerintah, dan belum optimalnya peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Kata Kunci: Dampak, Bebas Visa, Peraturan

**IMPLEMENTATION OF VISA FREE INCOME BASED ON
PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 21 OF 2016 ON FREE VISIT
VISA**

Rakha Aditya Afrizal

Abstract

In order to improve the relations of the Republic of Indonesia with other countries, it is necessary to provide convenience for foreign nationals of the country, government specific administrative regions of a country, and certain entities to enter the territory of the Republic of Indonesia which are carried out in the form of pay attention to principle of reciprocity and principle of benefits. The Government of Indonesia issued a Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2016 concerning Visit Visa Free. The regulation was also made because in order to provide greater benefits in improving the economy in general and an increase in the number of foreign tourist visits in particular, it is necessary to adjust the number of countries, government specific administrative regions of a country, and certain entities that are granted exemption from having a visitor visa. The research method used is normative juridical research, research using library data derived from primary, secondary, and tertiary sources which were analyzed descriptively. This study discusses the implications of applying visa-free policies in a labor perspective and how the government overcomes the impact of the application of visa-free policies. From this study, the results show that visa-free has a considerable impact in the field of employment, especially in the case of ilegal foreign workers who abuse visa-free policies, weak supervision from the government, and not yet optimal regulations regarding the use of foreign workers.

Keywords: Implementation, Visa Free, Regulation